

Diplomasi Publik Korea Selatan Dalam Membina Hubungan Bilateral Dengan Korea Utara Tahun 2017-2020

Felicia Tarida Asi*¹, Musa Maliki², Garcia Krisnando Nathanael³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

e-mail: *¹feliciatarida18@gmail.com , ²musamaliki@upnvj.ac.id , ³garcia@upnvj.ac.id

Abstract

This study discusses public diplomacy efforts undertaken by South Korea with the aim of reconciliation and fostering good bilateral relations with North Korea during the 2017 – 2020 period. To answer the problem formulation, the writer uses the concept of public diplomacy and multitrack diplomacy. The author uses a qualitative-descriptive research method and conducts a literature study on official government documents as a data collection technique. The results showed that there were three types of public diplomacy activities carried out by South Korea against North Korea during the 2017 – 2020 period. First, sports diplomacy efforts carried out by South Korea to North Korea were carried out through the holding of the 2018 Winter Olympics, the formation of a joint demonstration team taekwondo, organizing inter-Korean basketball matches, and establishing a joint Korean sports team for international matches. Second, the cultural diplomacy efforts carried out were the holding of the “Spring is Coming” concert and the excavation of the Manwoldae historical site. Third, the distribution of humanitarian aid is a public diplomacy effort that is often carried out by South Korea to North Korea.

Keywords— *Bilateral Relations, North Korea, Public Diplomacy, South Korea*

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dengan tujuan untuk rekonsiliasi dan pembinaan hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara selama periode tahun 2017 – 2020. Untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan konsep diplomasi publik dan *multitrack diplomacy*. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif - deskriptif dan melakukan studi literatur terhadap dokumen resmi pemerintah sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan terhadap Korea Utara selama periode tahun 2017 – 2020. Pertama, upaya diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara melalui penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, pembentukan tim demonstrasi gabungan *taekwondo*, penyelenggaraan pertandingan basket antarKorea, dan pembentukan tim olahraga gabungan Korea untuk pertandingan internasional. Kedua, upaya diplomasi budaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan konser “*Spring is Coming*” dan penggalian situs bersejarah Manwoldae. Ketiga, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi upaya diplomasi publik yang sering dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara.

Kata Kunci—*Diplomasi Publik, Hubungan Bilateral, Korea Selatan, Korea Utara*

1. Pendahuluan

Sebelum terjadinya Perang Dunia II, Korea Selatan dan Korea Utara pada awalnya merupakan sebuah negara tunggal jajahan Jepang pada tahun 1910. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan perjanjian dibawah pengawasan PBB, dimana perjanjian tersebut membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian melalui batas garis lintang 38 derajat untuk pembagian daerah kekuasaan militer (Resamaili, 2009). Bagian utara dari Semenanjung Korea (Korea Utara) dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan bagian selatan (Korea Selatan) dikuasai oleh Amerika Serikat. Pada awalnya, pembagian daerah Semenanjung Korea direncanakan hanya bersifat sementara saja, dikarenakan pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak mempunyai rencana berapa lama pasukan mereka akan menduduki daerahnya masing-masing (Oktorino, 2013). Tetapi, peluang kedua Korea untuk bersatu kembali sebagai negara yang utuh akhirnya kandas ketika tentara Korea Utara menyerang Korea Selatan pada 25 Juni 1950, dan menyebabkan meletusnya Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun (Don & Carlin, 2013). Pada tahun 1953, Perjanjian gencatan senjata mengakhiri Perang Korea yang sudah berlangsung selama 3 tahun, dan kedua negara bersepakat untuk menghentikan kontak senjata dan menyarankan kedua negara untuk “berperang” secara diplomatik. Karena perjanjian gencatan senjata ini hanya bersifat menghentikan perang untuk sementara waktu, dan bukan merupakan perjanjian perdamaian yang bersifat permanen, kedua negara ini dianggap masih berada dalam situasi perang sampai saat ini (Stueck, 1999). Pada saat ini, Korea Utara menjadi negara

bersistem totaliter dengan satu partai penguasa tertinggi, yang mempunyai ideologi sendiri yang disebut *juche*, sedangkan Korea Selatan menjadi negara bersistem republik yang berideologi demokrasi-liberal.

Upaya mengurangi ketegangan politik dan wacana proses reunifikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara sudah dimulai sejak tahun 1970-an melalui beberapa pertemuan, baik secara formal maupun informal. Awal dari segala usaha reunifikasi antarKorea dimulai pada tanggal 4 Juli 1972, dimana pemerintah kedua negara menyepakati sembilan prinsip reunifikasi dalam “*North-South Joint Statement*”, dimana pada prinsipnya, reunifikasi Korea Selatan dan Utara harus dilakukan dengan damai tanpa adanya kekerasan dan paksaan dari pihak manapun (Axelblom, 2015).

Gagasan dan keinginan untuk melakukan reunifikasi kedua negara kembali digaungkan pada akhir tahun 1990-an, bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin dan terpilihnya Kim Young-sam sebagai Presiden Korea Selatan pertama yang dipilih secara demokratis pada tahun 1993. Selanjutnya, usaha penyelesaian konflik di Semenanjung Korea kembali dilanjutkan oleh Presiden Kim Dae-jung yang terpilih pada tahun 1998 melalui kebijakan *Sunshine Policy*. Kebijakan tersebut berprinsip bahwa Korea Selatan tidak menoleransi tindakan provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara, tidak akan melakukan intervensi terhadap Korea Utara, dan berperan aktif dalam upaya kerja sama maupun reunifikasi kedua negara (Hanafiaty, 2019). Sampai pada hari ini, proses penyelesaian konflik dan upaya reunifikasi antar kedua negara masih berlangsung dengan menggunakan beragam cara yang bersifat tradisional, seperti menyelenggarakan pertemuan-

pertemuan diplomatik melalui KTT Antar Korea, pembuatan perjanjian dan deklarasi, hingga konfrontasi keras yang melibatkan pihak militer kedua negara. Namun, semua upaya tersebut masih belum dapat memberikan dampak yang nyata terhadap proses resolusi konflik kedua negara.

Tidak efektifnya strategi diplomasi tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan dalam menangani konflik Semenanjung Korea disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua negara seringkali dirusak oleh sikap Korea Utara yang tetap mempertahankan pengembangan dan peluncuran senjata nuklirnya. Sampai tahun 2020, Korea Utara sudah melakukan setidaknya enam kali uji coba nuklir dan sejumlah serangan militer kepada Korea Selatan melalui peristiwa penembakan turis Gunung Keumgang, penyerangan Kapal Perang AL *Cheonan*, dan serangan artileri ke Pulau Yeongpyeong (KBS World Radio, 2020). Kedua, pergantian kekuasaan Presiden Korea Selatan yang didominasi oleh partai berhaluan konservatif juga menjadi salah satu faktor penghambat proses resolusi konflik Semenanjung Korea. Mengingat bahwa paham politik konservatif di Korea Selatan sangat menentang segala bentuk komunisme, maka kaum konservatif Korea Selatan cenderung mengambil sikap yang keras terhadap Korea Utara dan merasa pesimis terhadap upaya reunifikasi kedua negara. Sedangkan dua Presiden Korea Selatan sebelum tahun 2017 berasal dari partai konservatif, yaitu Lee Myung-bak (periode 2008 – 2013) dan Park Geun-hye (periode 2013 – 2017) dikenal mempunyai sikap yang keras terhadap Korea Utara.

Upaya diplomasi tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan tidak selalu berjalan dengan lancar, maka penggunaan unsur *soft power* dalam

berdiplomasi mulai dipertimbangkan untuk menjadi upaya alternatif yang dapat digunakan oleh kedua negara, terutama oleh pihak Korea Selatan. Salah satu cara non-tradisional yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan bilateral antar kedua negara adalah dengan melakukan diplomasi publik. Penggunaan diplomasi publik sendiri tidak dimaksudkan untuk menggeser fungsi dan posisi diplomasi tradisional yang sudah lama dilakukan, tetapi digunakan sebagai upaya pendamping diplomasi tradisional yang bertujuan untuk mempengaruhi opini dan pandangan negara tujuan terhadap negara pelaku diplomasi.

Peluang kedua negara untuk melanjutkan usaha resolusi konfliknya kembali terbuka lebar pada tahun 2017, pada saat Presiden terpilih Korea Selatan, Moon Jae-in, berjanji akan kembali mengadaptasi kebijakan *Sunshine Policy* dan membangun komunikasi yang baik antara Korea Selatan dan Korea Utara (Orjoux & George, 2018). Moon Jae-in merupakan Presiden Korea Selatan keturunan dari Korea Utara pertama dan seorang politikus dari Partai Demokrat Korea (DPK) yang berhaluan liberalis. Dalam penanganan hubungan bilateral dengan Korea Utara, Moon Jae-in dikenal lebih mengutamakan cara yang bersifat humanis dan kooperatif yang sesuai dengan kebijakan *Sunshine Policy* yang didukungnya (Lestari, Karjaya, & Sood, 2021). Selama masa pemerintahannya, banyak upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dengan tujuan untuk membina hubungan bilateral dengan Korea Utara dan menyuarakan perdamaian di Semenanjung Korea.

Dengan strategi diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dan sikap kooperatif yang diberikan oleh pemerintah Korea Utara, hal ini

menandakan bahwa ketegangan antarkedua negara pada saat itu sedang menurun. Mengingat Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam keadaan “perang saudara” dikarenakan kedua negara belum mempunyai perjanjian perdamaian yang mengikat secara permanen. Hal ini juga memungkinkan kesempatan kedua negara untuk mengakhiri ketegangan politik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun akan semakin terbuka lebar.

Penelitian ini akan meneliti lebih lanjut dan mendeskripsikan secara rinci kegiatan-kegiatan diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Korea Selatan dalam rangka untuk memelihara hubungan bilateralnya dengan Korea Utara selama periode tahun 2017 - 2020. Sistematika artikel ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu pendahuluan, kerangka teori, metode riset, pembahasan dan simpulan. Untuk menganalisis upaya diplomasi publik Korea Selatan dalam membina hubungan bilateral dengan Korea Utara, penulis menggunakan konsep diplomasi publik dan *multitrack diplomacy*. Kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu diplomasi olahraga, diplomasi budaya, dan penyaluran bantuan kemanusiaan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Diplomasi Publik

Gurgu dan Cociuban (2016) menjelaskan diplomasi publik adalah suatu program pemerintah yang berfokus di bidang budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, informasi warga negara dan program produksi yang digunakan untuk mempromosikan kepentingan nasional suatu negara dengan menginformasikan

dan mempengaruhi masyarakat internasional. Namun, mengingat bahwa pelaksanaan diplomasi publik tidak hanya melibatkan pemerintah, maka warga negara juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan diplomasi publik. Hal ini juga harus didukung dengan komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga negara, agar pelaksanaan diplomasi publik dapat berjalan secara efektif. Selaras dengan pentingnya peran pemerintah dalam diplomasi publik, maka definisi dari Gurgu dan Cociuban dibenarkan oleh definisi dari Joseph Nye. Nye (2008:2) mendefinisikan diplomasi publik sebagai suatu instrumen yang digunakan pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk berkomunikasi dan menarik perhatian publik negara lain, dengan memperhatikan sumber daya potensial tersebut melalui penyiaran, ekspor budaya, pertukaran, dan lain sebagainya.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari diplomasi publik adalah untuk mengomunikasikan kepentingan nasional suatu negara kepada publik di luar negeri dengan menggunakan sumber daya yang bersifat *soft power* atau mempengaruhi opini publik tersebut. Namun, dalam penelitian yang ditulis oleh Rachmawati (2016), tujuan dari diplomasi publik tidak hanya sekedar berfokus dalam kepentingan nasional maupun citra positif suatu negara, tetapi juga berhubungan dengan kesadaran berbangsa dan identitas nasional setiap aktor diplomasi publik yang akan mempengaruhi dinamika relasi antar negara. Jika kesadaran berbangsa dan identitas nasional tersemat dengan kuat dalam setiap aktor diplomasi yang terlibat, maka diplomasi publik akan menjadi sebuah relasi positif dalam menjamin keseluruhan hubungan antar negara.

2.2 Diplomasi Multijalur (*Multitrack Diplomacy*)

Untuk mencapai tujuan kepentingan nasional, diplomasi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara tetapi juga antar negara dengan subyek hubungan internasional lainnya. Oleh karena itu, hal ini tercermin dalam konsep diplomasi multijalur atau *multitrack diplomacy*. Menurut Johan Galtung (1996) yang dikutip dari Kazansky (2020), *multitrack diplomacy* adalah pendekatan sistem untuk transformasi konflik, yang menggunakan pendekatan perilaku dan organik untuk perdamaian. Dalam hal ini, Galtung mengonsepan *multitrack diplomacy* sebagai suatu organisme hidup yang terus berkembang. Sama halnya dengan isu Hubungan Internasional yang semakin berkembang, maka jumlah aktor dan ketergantungan antara aktor individu dari sistem politik internasional terus meningkat. Kemudian, menurut John W. McDonald (2012) sebagai peneliti pertama yang memaparkan konsep *multitrack diplomacy*, *multitrack diplomacy* adalah konsep diplomasi yang menekankan bahwa perdamaian dunia dapat terwujud jika seluruh subyek dalam sistem internasional, baik itu pemerintah, individu, maupun kelompok swasta saling bersinergi untuk menciptakan perdamaian dunia dengan menggunakan upaya diplomasi *soft power* yang bersifat tidak agresif.

Berdasarkan dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa *multitrack diplomacy* merupakan pengembangan dari konsep dua jalur diplomasi, yaitu jalur pertama (*first track*) dengan aktor pemerintah, dan jalur kedua (*second track*) dengan aktor non-pemerintah. Kedua jalur tersebut kemudian diperluas menjadi sembilan jalur, yaitu aktor pemerintah, resolusi konflik profesional, bisnis, warga sipil,

pendidikan, aktivisme, agama, pendanaan, dan media (Notter & Diamond, 1996).

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga dari sembilan jalur, yaitu pemerintah, masyarakat, dan media massa. Pada jalur pertama, pemerintah Korea Selatan berperan sebagai inisiator sekaligus pelaksana upaya diplomasi publik yang akan dilakukan melalui pembuatan kebijakan-kebijakan luar negeri terkait, sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah Korea Utara terkait dengan pelaksanaan diplomasi publik yang akan dilakukan. Dalam jalur keempat, upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dapat memungkinkan masyarakat kedua negara untuk terlibat, bahkan warga kedua negara dapat saling berinteraksi dalam pelaksanaan. Sedangkan pada jalur kesembilan, media dan pers internasional berperan dalam menciptakan opini publik internasional terkait dengan pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan maupun rencana upaya reunifikasi yang akan dilakukan oleh kedua negara.

3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui lebih lanjut mengenai strategi diplomasi publik yang dijalankan oleh Korea Selatan dalam rangka mempromosikan upaya reunifikasinya dengan Korea Utara dalam rentang waktu yang telah ditentukan oleh penulis. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan agar penulis dapat mendeskripsikan dan menjelaskan secara detail bagaimana

strategi Korea Selatan dalam menggunakan diplomasi publik sebagai cara untuk membina hubungan bilateralnya dengan Korea Utara.

Penulis menggunakan teknik studi dokumen atau studi literatur untuk mengumpulkan data, dimana penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui pencarian secara daring. Untuk sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, artikel berita, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data terdiri dari tiga langkah analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dinamika Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Korea Utara

Semenanjung Korea pada awalnya merupakan sebuah wilayah kerajaan yang dipimpin oleh Dinasti Joseon yang kemudian dianeksasi menjadi wilayah jajahan Jepang pada tahun 1910. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan perjanjian yang membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian melalui batas garis lintang 38 derajat. Bagian utara Semenanjung Korea dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan bagian selatan dikuasai oleh Amerika Serikat (Resmaili, 2009:18). Namun, peluang kedua Korea untuk kembali bersatu sebagai negara yang utuh akhirnya kandas ketika pasukan wilayah Korea Utara melancarkan serangan

mendadak kepada wilayah Korea Selatan pada 25 Juni 1950. Serangan tersebut kemudian menjadi penanda dimulainya Perang Korea yang berlangsung selama tiga tahun (Oktorino, 2013:25-26). Pada bulan Juli 1951, perwakilan Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama dengan pihak Korea Selatan dan Korea Utara memulai “perang diplomatik” dengan melakukan perundingan gencatan senjata. Perundingan tersebut kemudian diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata yang secara resmi ditandatangani pada 27 Juli 1953 (Cahyo, 2012).

Pasca meletusnya Perang Korea yang berakhir pada tahun 1953, permusuhan antara kedua Korea semakin meningkat hingga akhir tahun 1960-an. Hal ini disebabkan karena kedua negara sering melakukan serangan satu sama lain dan saling bersaing untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari dunia internasional. Hal ini menyebabkan interaksi antar pemerintah kedua Korea pasca Perang Korea dapat dikatakan hampir tidak ada (Yoon, 2005:238). Namun, tensi politik antara Korea Selatan dan Korea Utara sempat menurun ketika memasuki dekade 1970-an. Hal ini terlihat melalui upaya kedua Korea yang mengadakan sebuah pertemuan rahasia yang diadakan di daerah zona demiliterisasi (DMZ) di desa Panmunjeom pada akhir tahun 1971 hingga Maret 1972 (KBS World Radio, 2020). Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan sebuah deklarasi bersama dalam “North-South Joint Statement” yang disepakati pada tanggal 4 Juli 1972, dimana deklarasi tersebut merupakan upaya pertama yang dilakukan oleh kedua Korea untuk mengurangi tensi politik antar negara. Namun, karena adanya rasa curiga di antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh perbedaan pandangan selama dialog, maka hal ini menyebabkan tensi politik antar kedua negara kembali

meningkat pada tahun 1980-an (Mas'ood & Yoon, 2004:38). Terdapat beberapa insiden yang menyebabkan hubungan bilateral antar Korea kembali memanas. Kedua insiden tersebut adalah pengeboman di Kota Rangoon, Burma pada saat Presiden Chun Doo-hwan mengadakan kunjungan resmi ke Rangoon pada 9 Oktober 1983, dan pengeboman pesawat Korean Air KAL 858 pada 29 November 1987 (Don & Carlin, 2013:418, 581).

Hubungan bilateral antar Korea mulai kembali meningkat ketika memasuki dekade 1990-an setelah Korea Selatan mulai mengubah orientasi kebijakan luar negerinya, terutama kepada Korea Utara. Korea Selatan mulai mencoba mendekati Korea Utara secara diplomatis dengan tujuan agar Korea Utara bersedia untuk bergabung dalam pergaulan dunia internasional. Upaya Korea Selatan tersebut dimulai dengan mengizinkan perdagangan langsung antar Korea untuk pertama kalinya pada tahun 1989 (Yoon, 2005:242 - 243). Korea Selatan juga mulai menggunakan upaya diplomasi publik kepada Korea Utara untuk pertama kalinya melalui penyelenggaraan pertandingan sepak bola antar Korea (South - North Unification Football Goodwill Game) pada bulan Oktober 1990 di Seoul dan Pyongyang (Jung, 2013:11). Selain itu, Korea Selatan juga memulai upaya diplomasi publik melalui penyaluran bantuan kemanusiaan untuk pertama kalinya kepada Korea Utara pada tahun 1995.

Hubungan baik antara Korea Selatan dan Korea Utara tetap terjaga pada masa kepemimpinan Presiden Kim Dae-jung selama periode tahun 1998 – 2003. Bahkan, untuk pertama kalinya hubungan bilateral antar Korea memasuki situasi baru yang lebih bersahabat berkat kebijakan Sunshine Policy yang dihidarkan oleh Presiden Kim. Selain menerapkan kebijakan Sunshine

Policy, Korea Selatan dan Korea Utara juga berhasil mengadakan KTT Antar Korea untuk yang pertama kalinya pada 13 – 15 Juni 2000 di Pyongyang, Korea Utara. Dalam penyelenggaraan KTT Antar Korea ini, kedua Korea menyetujui deklarasi South-North Joint Declaration dan South-North Agreement sekaligus menyepakati beberapa kerja sama bilateral antar Korea (Anindita, 2017:7). Beberapa kerja sama tersebut adalah pembukaan program wisata Gunung Geumgang di Korea Utara, mengadakan reuni pertama untuk keluarga yang terpisah, dan memulai proyek penyambungan jaringan kereta api antar Korea rute Seoul – Sinuiju (KBS World Radio, 2020). Namun, hubungan bilateral antar Korea kembali mengalami tantangan pada masa pemerintahan Presiden Roh Moo-hyun selama periode tahun 2003 – 2008. Hal ini disebabkan oleh dimulainya krisis nuklir Korea Utara yang dimulai dengan pengumuman pengunduran diri Korea Utara dari Perjanjian Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT) pada tahun 2003 dan uji coba senjata nuklir pertama pada bulan Oktober 2006 (Seth, 2011). Walaupun selama masa pemerintahan Roh Moo-hyun dibayangi dengan ancaman krisis nuklir Korea Utara, tetapi Korea Selatan tetap berusaha menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara. Hal ini terlihat melalui keberhasilan Korea Selatan dalam mengadakan KTT Antar Korea untuk kedua kalinya pada 2 – 4 Oktober 2007 (United States Institute of Peace, 2007)

Namun, hubungan bilateral antar Korea kembali mengalami penurunan drastis setelah politik konservatif masuk ke dalam pemerintahan Korea Selatan melalui terpilihnya Presiden Lee Myung-bak bulan Desember 2007. Selama masa pemerintahan Presiden Lee, terjadi beberapa insiden yang menyebabkan peningkatan ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Beberapa

kejadian tersebut adalah penembakan turis Korea Selatan di Gunung Geumgang, penyerangan Kapal AL Korea Selatan "Cheonan", penyerangan Pulau Yeonpyong, dan uji coba nuklir kedua yang semuanya dilakukan oleh pihak Korea Utara. Ketika masa jabatan Presiden Lee Myung-bak digantikan oleh Park Geun-hye pada bulan Desember 2012, Korea Selatan kembali dibayangi dengan ancaman krisis nuklir Korea Utara. (Wertz, 2017). Selama masa pemerintahan Presiden Park, Korea Utara telah melakukan dua uji coba senjata nuklir pada 12 Februari 2013 dan 6 Januari 2016. Hal ini tentunya menyebabkan hubungan bilateral antar Korea semakin menurun, bahkan penurunan hubungan bilateral kedua negara mencapai titik terendahnya pada tahun 2016. Dengan menurunnya hubungan bilateral antar Korea pada masa pemerintahan konservatif di Korea Selatan, hal ini juga ikut mempengaruhi upaya diplomasi publik Korea Selatan kepada Korea Utara pada saat itu. Selama masa pemerintahan konservatif, Korea Selatan telah menghentikan kegiatan wisata di Gunung Geumgang di Korea Utara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan pada tahun 2008 dan mengurangi jumlah bantuan kemanusiaan yang dikirimkan kepada Korea Utara.

Masa jabatan kepresidenan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Moon Jae-in pada bulan Mei 2017. Melihat dari sikap politik Presiden Moon yang bersifat lebih lunak dan humanis kepada Korea Utara, hubungan bilateral antar Korea pada masa pemerintahannya kembali meningkat secara drastis. Hal ini terlihat melalui upaya Presiden Moon yang menginisiasi Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diselenggarakan di Pyeongchang, Korea Selatan (Yonhap News, 2017). Setelah pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin

2018, Korea Selatan memulai langkah pertamanya untuk melakukan rekonsiliasi melalui jalur dialog melalui penyelenggaraan KTT Antar Korea yang diselenggarakan sebanyak tiga kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 27 April, 26 Mei, dan 18 September 2018. Dalam KTT Antar Korea pertama yang diselenggarakan di Desa Panmunjeom, Presiden Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara, Kim Jongun menandatangani Panmunjeom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula yang berisi persetujuan kedua negara untuk memfasilitasi kemajuan dalam hubungan antar Korea, dan untuk membangun rezim perdamaian yang permanen di Semenanjung Korea (Korean Cultural Center, 2020). Penyelenggaraan KTT Antar Korea 2018 tersebut merupakan puncak dari titik balik hubungan bilateral yang positif antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Namun, hubungan bilateral yang positif antara Korea Selatan dan Korea Utara tidak berlangsung lama sampai tahun 2019 setelah KTT AS – Korea Utara 2019 tidak dapat mencapai kesepakatan. Kegagalan KTT tersebut juga diikuti dengan tindakan Korea Utara yang kembali memulai serangkaian uji coba rudal jarak pendek dan Korea Selatan dan mengambil bagian dalam latihan militer bersama dengan Amerika Serikat pada bulan Agustus 2019. Hubungan bilateral antar Korea semakin menurun pada awal bulan Juni 2020, setelah Korea Utara memperingatkan Korea Selatan untuk mencegah aktivis konservatif dan pengungsi Korea Utara mengirim selebaran propaganda anti rezim di wilayah perbatasan (Banka, 2020). Walaupun selama tahun 2019 – 2020 hubungan bilateral antar Korea tidak berada dalam situasi yang baik, namun pemimpin kedua negara tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan

saling mengirimkan surat persahabatan pada 8 dan 12 September 2020. Dalam surat tersebut, pemimpin kedua negara menyatakan keprihatinan mereka terhadap pandemi COVID-19 dan bencana angin topan yang melanda kedua negara (Carter, 2021).

4.2 Diplomasi Publik Korea Selatan Dalam Membina Hubungan Bilateral Dengan Korea Utara Tahun 2017 – 2020

4.2.1 Diplomasi Publik Dalam Bidang Olahraga

Korea Selatan merupakan salah satu contoh negara yang aktif menggunakan diplomasi olahraga sebagai instrumen untuk berdiplomasi dengan negara lain, terutama dalam kepentingan rekonsiliasi dengan Korea Utara. Dalam penelitiannya, Kunis (2017) menjelaskan bahwa diplomasi olahraga menjadi salah satu upaya diplomasi publik yang ampuh untuk mencairkan suasana politik antara Korea Selatan dan Korea Utara yang sering mengalami fluktuasi akibat isu nuklir Korea Utara yang terus mengancam, sehingga diplomasi olahraga dapat dijadikan cara alternatif bagi Korea Selatan untuk tetap menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara. Terdapat beberapa kegiatan diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua negara yang dilaksanakan antara tahun 2017 hingga tahun 2020, yaitu penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, diplomasi bela diri taekwondo, penyelenggaraan pertandingan basket antar Korea, dan pembentukan tim olahraga gabungan antar Korea.

Penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018

Olimpiade Musim Dingin 2018 (*2018 Winter Olympics*) merupakan sebuah pesta olahraga musim dingin yang diselenggarakan pada tanggal 9 – 25 Februari 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Sebagai negara penyelenggara, Korea Selatan berhasil menjadikan Olimpiade Musim Dingin 2018 menjadi sebuah tonggak sejarah besar dalam hubungan bilateral antar Korea melalui partisipasi dari Korea Utara dan juga kembalinya tim gabungan Korea untuk bertanding dalam Olimpiade. Kesediaan Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 tentunya tidak terlepas dari upaya Korea Selatan yang secara aktif melakukan inisiasi dan membantu Korea Utara untuk mempersiapkan partisipasinya dalam Olimpiade tersebut, walaupun situasi politik kedua negara berada dalam kondisi yang buruk.

Partisipasi Korea Utara pada Olimpiade Musim Dingin 2018 diawali dengan inisiasi Presiden Moon Jae-in yang mengajak Korea Utara untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 melalui pidato yang dibawakan Presiden Moon Jae-in di acara *Körber Foundation* pada 6 Juli 2017. Dalam pidatonya, Moon Jae-in menekankan bahwa partisipasi Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 merupakan suatu kemajuan yang besar dalam upaya denuklirisasi Korea Utara sekaligus menuju perdamaian di Semenanjung Korea (Yonhap News, 2017). Sebagai respon atas inisiasi yang dilakukan oleh Presiden Moon, Kim Jong-un kemudian mengumumkan bahwa Korea Utara akan ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin 2018 melalui sebuah pidato yang dibawakan pada acara Tahun Baru 2018. (BBC News Indonesia,

2018). Untuk mempersiapkan kehadiran Korea Utara pada Olimpiade Musim Dingin 2018, Korea Selatan dan Korea Utara menyelenggarakan tiga pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 9, 17, dan 20 Januari 2018. Pada salah satu Pertemuan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan pada 17 Januari 2021, kedua negara menyepakati pembentukan tim gabungan untuk cabang olahraga hoki es wanita, parade bersama pada acara pembukaan Olimpiade, mendatangkan tim pemandu sorak dan tim demonstrasi *taekwondo* Korea Utara, dan penyelenggaraan sesi latihan bersama untuk atlet ski di Resor Ski Masikryong di Korea Utara (Ministry of Unification, 2019).

Pada acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diadakan pada 9 Februari 2018, para atlet Korea Selatan dan Korea Utara berparade bersama dibawah satu tim "Korea". Dalam parade bersama tersebut, dua perwakilan atlet Korea membawa bendera Unifikasi Korea yang berlatar belakang putih dengan gambar wilayah Semenanjung Korea berwarna biru, dan diiringi lagu tradisional "Arirang" sebagai lagu resmi unifikasi Korea (Kim C. K., 2018). Sedangkan pada pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin 2018, tim gabungan Korea cabang es hoki dibentuk dengan jumlah pemain 35 orang, yang terdiri dari 12 pemain Korea Utara dan 23 pemain Korea Selatan. Walaupun tim hoki es wanita gabungan Korea hanya mendapatkan posisi terakhir dari delapan tim yang bertanding, pembentukan tim gabungan tersebut merupakan suatu kemajuan yang signifikan untuk hubungan bilateral kedua Korea dalam bidang olahraga (Ministry of Unification, 2019).

Berangkat dari konsep *multitrack diplomacy*, peran Pemerintah Korea Selatan sebagai aktor jalur pertama terlihat

melalui persiapan penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018. Pemerintah Korea Selatan memperlihatkan keseriusannya untuk mempersiapkan partisipasi Korea Utara dalam olimpiade tersebut agar tujuan utama penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018 sebagai Olimpiade Perdamaian (*Peace Olympics*) dapat terpenuhi. Kemudian, keterlibatan masyarakat sipil sebagai aktor jalur keempat terlihat melalui para atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade tersebut. Selama berlangsungnya Olimpiade Musim Dingin 2018, para atlet dari kedua Korea menunjukkan interaksi dan kebersamaan mereka melalui beberapa kegiatan seperti parade bersama pada acara pembukaan, latihan bersama, dan pembentukan tim gabungan untuk hoki es wanita. Selain itu, media massa sebagai aktor jalur kesembilan mempunyai peran yang signifikan dalam mempromosikan dan memberitakan penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018. Hal ini terlihat dengan banyaknya pemberitaan positif mengenai kesuksesan Korea Selatan dalam menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin 2018 beserta momen-momen menarik selama penyelenggaraan Olimpiade.

Diplomasi Bela Diri Taekwondo

Taekwondo merupakan seni bela diri tradisional Korea yang saat ini menjadi salah satu bela diri yang banyak dipelajari di seluruh dunia. Saat ini, taekwondo telah digunakan sebagai salah satu instrumen diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada negara lain, terutama kepada Korea Utara yang mempunyai akar budaya yang sama dengan Korea Selatan. Dalam penelitiannya, Johnson dan Vitale (2018) menjelaskan bahwa taekwondo telah aktif digunakan sebagai alat untuk menjembatani kesenjangan politik antara

kedua negara Korea yang terpecah sekaligus menjadi salah satu alat diplomasi antar negara. Hal ini terlihat melalui upaya Jenderal Choi Hong-hi dan organisasi induk taekwondo buatannya, *International Taekwondo Federation* (ITF) yang mengadakan demonstrasi *taekwondo* ke beberapa negara di dunia pada periode tahun 1960-an untuk memperkenalkan olahraga bela diri tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, *World Taekwondo* atau WT (sebelumnya bernama *World Taekwondo Federation* atau WTF) terbentuk pada tahun 1970-an dan menjadi induk organisasi *taekwondo* dari Korea Selatan yang lebih dikenal di seluruh dunia, terutama untuk urusan pertandingan internasional dan Olimpiade.

Walaupun kedua organisasi taekwondo tersebut mempunyai banyak perbedaan dalam sistem dan aturan dalam taekwondo, kedua organisasi tersebut tetap menjalin hubungan baik antar organisasi dan melakukan kerjasama. Hal ini terlihat pada bulan Agustus 2014, ketika WT dan ITF menandatangani sebuah MOU untuk memulai proses kerja sama antar organisasi dengan membentuk tim demonstrasi *taekwondo* bersama. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di sela-sela acara *Youth Olympics* di Nanjing, China. Setelah kedua organisasi menyepakati kerjasama tersebut, tim demonstrasi gabungan WT dan ITF kemudian dibentuk dan memulai demonstrasi bersama di *World Taekwondo Championship 2015* di Chelyabinsk, Rusia (Johnson & Vitale, 2018).

Pada tahun 2017, pihak Korea Selatan melalui WT mengundang para atlet taekwondo beserta delegasi Korea Utara dibawah ITF untuk berpartisipasi dalam *World Taekwondo Championship ke-23* yang diselenggarakan di Muju, Korea Selatan pada 24 – 30 Juni 2017. Dalam

kejuaraan tersebut, tim demonstrasi gabungan menampilkan demonstrasi taekwondo bersama pada acara pembukaan kejuaraan pada 24 Juni 2017. Selain menghadiri kejuaraan *World Taekwondo Championship*, tim demonstrasi gabungan juga melakukan pertunjukkan demonstrasi keliling di beberapa tempat di Korea Selatan selama tahun 2017. Pertunjukkan tim demonstrasi gabungan tersebut mendapat sambutan yang positif dari masyarakat Korea Selatan dan dunia (Johnson & Vitale, 2018). Memasuki tahun 2018, tim demonstrasi *taekwondo* gabungan Korea kembali melakukan demonstrasi dalam pembukaan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 yang diselenggarakan pada 9 Februari 2018, dan juga melakukan pertunjukkan di Gangwon Career Center, Sokcho pada esok harinya. Kemudian, tim demonstrasi gabungan juga melakukan pertunjukkan di Pyongyang Grand Theatre pada 2 April 2018. Pada saat itu, pihak Korea Utara mengundang pihak Korea Selatan dari WT untuk melakukan pertunjukkan demonstrasi *taekwondo* pada 1 April 2018 (Ministry of Unification, 2019).

Kerjasama antara WT dan ITF dalam demonstrasi gabungan *taekwondo* kembali berlanjut pada tahun 2019, ketika tim demonstrasi dari kedua organisasi kembali menampilkan demonstrasi *taekwondo* dalam rangkaian acara perayaan 25 tahun masuknya *taekwondo* sebagai cabang olahraga Olimpiade, yang diselenggarakan pada 5 – 12 April 2019. Pada hari pertama pertunjukkan pada 5 April, tim demonstrasi tampil di kantor pusat perwakilan ITF di Vienna, Austria. Pertunjukkan kemudian dilanjutkan pada 11 April 2019 di Museum Olimpiade di Lausanne, Swiss. Tur demonstrasi gabungan yang dilakukan selama seminggu kemudian ditutup pada 12 April 2019 dengan menyelenggarakan

penampilan di Kantor PBB di Geneva, Swiss.

Melihat dari konsep *multitrack diplomacy* yang dijelaskan oleh McDonald (2012), pelaksanaan diplomasi olahraga taekwondo lebih dominan dijalankan oleh masyarakat sebagai aktor jalur keempat melalui organisasi WT dan ITF sebagai organisasi induk taekwondo yang bersifat independen untuk Korea Selatan dan Korea Utara. Walaupun pelaksanaan diplomasi taekwondo didominasi oleh peran organisasi induk, namun pemerintah tetap mempunyai peran yang penting dalam beberapa acara yang bersifat internasional. Namun, peran media massa sebagai aktor jalur kesembilan dalam menyebarkan informasi terkait dengan diplomasi taekwondo hanya berjalan dengan baik pada acara tertentu sehingga tidak semua acara yang diikuti oleh tim demonstrasi mendapatkan perhatian yang besar dari media massa lokal Korea Selatan dan internasional. Contohnya, penampilan tim demonstrasi taekwondo di acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018 mendapatkan banyak sorotan positif media massa.

Penyelenggaraan Pertandingan Basket AntarKorea

Pertandingan Basket Antar Korea (*Unification Basketball Games*) merupakan sebuah pertandingan basket yang diselenggarakan oleh Korea Selatan dan Korea Utara pada 3 – 6 Juli 2018 di Gymnasium Ryugyong Chung Ju-yung, Pyongyang. Pertandingan basket antar Korea tersebut direncanakan melalui sebuah pertemuan bidang olahraga antar Korea tingkat tinggi yang diadakan pada 18 Juni 2018 di Panmunjeom, Korea Selatan (Ministry of Unification, 2019). Pertandingan basket ini merupakan pertandingan yang pertama setelah terakhir

kali diadakan pada bulan Oktober 2003 (Choi H. S.,2018).

Pertandingan basket ini diselenggarakan selama dua hari. Pada pertandingan pertama yang diselenggarakan pada 4 Juli 2018, pemain Korea Selatan dan Korea Utara digabung menjadi satu tim, dan kedua tim campuran yang akan bertanding diberi nama tim “*Peace*” dan tim “*Prosperity*”. Sedangkan pada pertandingan kedua yang diselenggarakan pada 5 Juli 2018, tim Korea Selatan dan Korea Utara dijadwalkan untuk bermain melawan satu sama lain. Dalam pertandingan tersebut, kedua negara tidak akan menggunakan bendera nasional, memainkan lagu kebangsaan, dan komentator pertandingan tidak menyebutkan nama negara secara langsung. Sehingga penyebutan nama negara diganti dengan sebutan “Tim Biru” untuk tim Korea Selatan dan “Tim Merah” untuk tim Korea Utara (Ministry of Unification, 2019).

Melihat dari konsep *multitrack diplomacy*, Pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara sebagai aktor jalur pertama mempunyai peran yang penting dalam menyelenggarakan sekaligus mendukung pertandingan basket Antar Korea. Hal ini terlihat melalui kehadiran pejabat penting dari kedua negara untuk mendukung pertandingan basket tersebut, seperti Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myung-gyon, Menteri Olahraga Korea Utara Kim Il-guk, dan Wakil Menteri Olahraga Korea Utara Won Kil-u. Dalam sambutan pembukaan pertandingan, Kim Il-guk menyatakan bahwa penyelenggaraan pertandingan basket antar Korea ini merupakan suatu peristiwa yang menguntungkan bagi kedua negara dan berharap agar kedua negara dapat saling merangkul satu sama lain untuk mencapai impian menuju perdamaian dan penyatuan

Semenanjung Korea di masa depan (Ji, 2018).

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil sebagai aktor jalur keempat terlihat melalui para atlet kedua negara yang bertanding sekaligus masyarakat Korea Utara yang antusias menonton pertandingan. Hal ini terlihat melalui kehadiran 12 ribu warga lokal Pyongyang yang menonton pertandingan basket tersebut dengan antusiasme yang tinggi. Selama pertandingan basket berlangsung, para pemain basket dari kedua negara tetap bertanding secara sportif tanpa melihat latar belakang mereka yang berasal dari negara yang saling bertikai. Namun, peran media massa sebagai aktor jalur kesembilan dalam menyiarkan pertandingan basket antar Korea kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena hanya ada beberapa awak media lokal Korea Selatan yang diizinkan oleh pemerintah untuk meliput pertandingan secara langsung.

Pembentukan Tim Olahraga Gabungan AntarKorea

Selanjutnya, upaya lain yang dilakukan Korea Selatan untuk melakukan diplomasi olahraga dengan Korea Utara adalah melalui pembentukan tim olahraga gabungan kedua Korea yang akan dikirimkan ke pertandingan-pertandingan berskala internasional. Pada awalnya, pembentukan tim gabungan Korea pertama kali dilakukan pada tahun 1991 untuk pertandingan *World Table Tennis Championship 1991* di Chiba, Jepang dan *World Junior Soccer Championship* di Portugal (Jung, 2013). Namun, pembentukan tim gabungan Korea tidak dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya dikarenakan tensi politik antar Korea yang sering mengalami eskalasi akibat sikap Korea Utara yang sering kali bermasalah. Selain itu, kedua negara juga sering tidak mendapatkan kesepakatan yang jelas pada

saat melakukan negosiasi terkait dengan pembentukan tim selama bertahun-tahun (Suprianto, 2019).

Namun, pembentukan tim gabungan Korea akhirnya kembali dilanjutkan pada masa pemerintahan Moon Jae-in pada tahun 2018. Dengan kesuksesan pembentukan tim gabungan hoki es wanita untuk Olimpiade Musim Dingin 2018, maka upaya pembentukan tim gabungan kembali dilanjutkan untuk beberapa pertandingan olahraga internasional lainnya. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa partisipasi tim olahraga gabungan Korea dalam beberapa pertandingan olahraga internasional selama tahun 2017 – 2019, yaitu:

Tabel 1. Partisipasi Tim Olahraga Gabungan Korea Pada Pertandingan Olahraga Internasional

Nama Pertandingan Olahraga	Prestasi
<i>World Team Table Tennis Championship 2018</i>	Medali perunggu
<i>Korea Open International Table Tennis Tournament 2018</i>	Medali emas (ganda campuran) Medali perunggu (ganda putra)
<i>Asian Games 2018</i>	1 medali emas (perahu naga putri 500 m) 1 medali perak (basket putri) 2 medali perunggu (lomba perahu naga putri 200 m & perahu naga putra 1000 m)

<i>World Judo Championship 2018</i>	Medali perunggu (tim campuran)
<i>Asian Para Games 2018</i>	1 medali perak (tenis meja) 1 medali perunggu (renang)
<i>Swedish Open International Table Tennis Tournament 2018</i>	N/A
<i>World Men's Handball Championship 2019</i>	N/A

Sumber: Ministry of Unification, 2019

Namun, tim gabungan Korea kembali tidak aktif berpartisipasi dalam pertandingan olahraga internasional pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar partisipasi tim Korea ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau dibatalkan. Tim gabungan Korea sempat direncanakan akan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas Tokyo 2020 untuk cabang olahraga basket putri, hoki putri, judo, dan dayung. Tetapi, Olimpiade tersebut ditunda hingga pertengahan tahun 2021 akibat pandemi COVID-19 yang semakin meluas (Ministry of Unification, 2021). Kemudian, Korea Selatan akhirnya harus bertanding sendiri setelah Korea Utara menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Panas 2020 (Choe, 2021).

Berdasarkan konsep *multitrack diplomacy* yang dikemukakan oleh McDonald (2012), Pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara sebagai aktor jalur pertama berperan penting dalam mengirimkan atlet dari masing-masing negaranya untuk bergabung dalam satu Tim

Korea dan melakukan diskusi terkait dengan upaya pembentukan Tim Korea. Selain pemerintah kedua negara, para atlet yang ikut berpartisipasi dalam pertandingan juga ikut berperan sebagai aktor diplomasi jalur keempat yang dapat mempromosikan upaya perdamaian Semenanjung Korea. Para atlet dari kedua negara yang tergabung dalam Tim Korea merepresentasikan impian penyatuan Semenanjung Korea yang selama ini menjadi impian kedua negara selama bertahun-tahun. Namun, peran media massa dalam menyebarkan informasi terkait dengan pembentukan Tim Korea hanya berjalan dengan baik pada beberapa pertandingan tertentu. Oleh karena itu, tidak semua pertandingan yang diikuti oleh Tim Korea mendapatkan *exposure* yang besar dari media massa. Seperti pada penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018, banyak media internasional dan lokal Korea Selatan memberitakan kesuksesan tim gabungan Korea yang memenangkan beberapa cabang olahraga.

4.2.2 Diplomasi Publik Dalam Bidang Sosial-Budaya

Korea Selatan sendiri telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang sukses memanfaatkan budaya dalam negerinya, seperti melalui fenomena Korean Wave atau Hallyu dengan tujuan untuk mempromosikan budaya Korea Selatan kepada dunia internasional. Melihat dari kesuksesan upaya diplomasi budaya yang telah dilakukan, maka Korea Selatan selanjutnya memanfaatkan instrumen kebudayaannya untuk kepentingan rekonsiliasi dan perdamaian, terutama dengan Korea Utara. Terdapat dua kegiatan diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara untuk memperbaiki hubungan bilateral kedua

negara yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 hingga tahun 2020, yaitu penyelenggaraan Konser “*Spring is Coming*” dan proyek ekskavasi situs bersejarah Manwoldae

Penyelenggaraan Konser “*Spring is Coming*”

Konser “*Spring is Coming*” merupakan sebuah konser musik yang diselenggarakan pada 1 dan 3 April 2018 di Pyongyang, Korea Utara. Konser yang diselenggarakan selama dua hari ini bertujuan untuk menjaga suasana perdamaian yang sudah dibangun oleh kedua negara selama penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018 sekaligus sebagai tanda balasan kepada Korea Utara yang sebelumnya telah mendatangkan Orkestra Samjiyon ke Korea Selatan pada bulan Februari 2018. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan konser, Korea Selatan dan Korea Utara mengadakan sebuah pertemuan tingkat kerja pada 20 Maret 2018 di Panmunjeom. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati bahwa pertunjukan seni yang bertajuk “*Spring is Coming*” akan diselenggarakan selama dua hari di Pyongyang, yaitu pada tanggal 1 dan 3 April 2018, dan jumlah rombongan dari pihak Korea Selatan yang didatangkan sebanyak 160 orang (Ministry of Unification, 2019).

Pertunjukan hari pertama digelar pada 1 April 2018 di East Pyongyang Grand Theatre yang berkapasitas 1500 orang. Korea Selatan mendatangkan 11 musisi ternamanya yang akan tampil di konser, meliputi Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Yoon Do-hyun, Baek Ji-young, Kang San-ae, Seohyun, pianis Kim Kwang-min, band *rock* YB, dan grup K-pop Red Velvet (Yim, 2018). Pada pertunjukan hari pertama, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un dan istrinya, Ri Sol-ju secara

langsung menghadiri penyelenggaraan konser tersebut dengan didampingi oleh Menteri Kebudayaan Korea Selatan, Do Jong-hwan. Selain menghadiri konser, Kim Jong-un juga meluangkan waktunya untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan para musisi Korea Selatan (Anonim, 2018). Kemudian, pertunjukan hari kedua digelar pada 3 April 2018 di Gymnasium Ryugyong Chung Ju Yong yang berkapasitas 12 ribu orang. Pada pertunjukan hari kedua, para musisi Korea Selatan bergabung dengan Orkestra Samjiyon untuk melakukan penampilan kolaborasi (Kim & Yang, 2018).

Berdasarkan konsep *multitrack diplomacy*, Pemerintah Korea Selatan dan Korea Utara sebagai aktor jalur pertama berperan penting dalam merencanakan penyelenggaraan konser “*Spring is Coming*” sekaligus mendukung jalannya konser tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah terlihat ketika pejabat pemerintah kedua negara menghadiri konser di hari pertama. Selain pemerintah, peran aktor masyarakat sebagai aktor jalur keempat juga terlihat melalui musisi Korea Selatan dan Korea Utara yang mengisi acara konser. Para musisi tersebut berperan dalam upaya diplomasi dan pertukaran budaya antar negara melalui lagu-lagu yang mereka bawakan selama konser. Kemudian, media massa lokal dan internasional sebagai aktor jalur kesembilan berperan untuk menyiarkan jalannya konser secara langsung dan memberitakan kesuksesan penyelenggaraan konser “*Spring is Coming*” kepada dunia internasional. Dengan adanya pemberitaan positif dari media massa terkait dengan penyelenggaraan konser “*Spring is Coming*” tentunya berdampak positif bagi citra Korea Selatan sebagai pihak penyelenggara konser tersebut.

Proyek Ekskavasi Situs Bersejarah Manwoldae

Selain melalui upaya pertukaran budaya melalui konser, upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara juga dilakukan melalui pemeliharaan situs kebudayaan bersejarah, mengingat bahwa Korea Selatan dan Korea Utara mempunyai akar kebudayaan yang sama. Situs kebudayaan bersejarah yang dimiliki bersama oleh Korea Selatan dan Korea Utara merupakan sebuah kompleks istana kerajaan bernama “Manwoldae” yang terletak di daerah Kaesong, Korea Utara. Proyek ekskavasi situs Manwoldae yang dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan mulai dilaksanakan pada tahun 2007, dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya nasional dan mengembalikan homogenitas antara penduduk Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, proyek tersebut sempat dihentikan pada tahun 2016, ketika hubungan bilateral antar Korea kembali memburuk pada saat Korea Utara menggelar uji coba nuklir yang keempat.

Pada tahun 2018, hubungan bilateral antar Korea sempat membaik sehingga kedua negara kembali melanjutkan proyek survei ekskavasi Manwoldae pada tanggal 22 Oktober – 10 November 2018 dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan desain kompleks istana dan penggalian artefak yang ada di dalam kompleks situs. Selain melanjutkan proyek ekskavasi, Pemerintah Korea Selatan juga menyelenggarakan sebuah pameran khusus yang bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan asli Korea dari Dinasti Goryeo. Pameran tersebut diadakan di daerah Pyeongchang selama penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, dimulai dari tanggal 9

Februari hingga 18 Maret 2018 (Ministry of Unification, 2019).

Memasuki tahun 2019, proyek ekskavasi Manwoldae kembali dihentikan seiring dengan memburuknya hubungan bilateral antar Korea akibat tindakan Korea Utara yang kembali menggelar uji coba rudal jarak pendek. Walaupun proyek ekskavasi dihentikan sementara waktu, Pemerintah Korea Selatan tetap menyelenggarakan sebuah pameran yang menampilkan koleksi barang-barang peninggalan yang berhasil didapatkan pada proyek ekskavasi sebelumnya di tahun 2018. Pameran tersebut bertajuk “*Manwoldae: 12 Years of Excavation in Kaesong*” yang diadakan di Kompleks Istana Deoksugung. Sedangkan pada tahun 2020, kelanjutan dari proyek ekskavasi Manwoldae masih belum menemukan titik terang. Selain itu, sebagian besar acara pameran yang direncanakan juga harus dibatalkan atau ditunda akibat munculnya pandemi COVID-19. Selama tahun 2020, pameran peninggalan Manwoldae hanya diselenggarakan di dua tempat (Ministry of Unification, 2021).

Berangkat dari konsep *multitrack diplomacy* yang dijelaskan oleh McDonald (2012), terlihat bahwa pemerintah sebagai aktor jalur pertama merupakan aktor yang berperan penting untuk merencanakan jalannya proyek ekskavasi Manwoldae sekaligus mengadakan pameran yang memperlihatkan barang-barang peninggalan situs. Kemudian, peran aktor masyarakat sebagai aktor jalur keempat terlihat melalui para peneliti, arkeolog, sejarawan, dan pihak-pihak terkait dari kedua Korea. Para aktor jalur keempat tersebut berperan dalam melakukan penggalian dan pencarian barang-barang peninggalan di sekitar situs. Namun, peran media massa sebagai aktor jalur kesembilan dalam menginformasikan kegiatan ekskavasi situs Manwoldae dapat

dikatakan kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh lokasi situs Manwoldae yang berada di dalam wilayah Korea Utara, sehingga hanya sedikit media massa yang bersedia meliput kegiatan ekskavasi tersebut. Dengan sedikitnya media massa yang memberitakan kegiatan ekskavasi membuat situs Manwoldae menjadi kurang terkenal di dunia internasional.

4.2.3 Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Kepada Korea Utara

Pemberian bantuan kemanusiaan merupakan salah satu bentuk diplomasi publik yang paling umum dilakukan oleh Korea Selatan untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Korea Utara. Dalam praktiknya, Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kerjasama dengan LSM dan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Sejak pertama kali dilakukan pada tahun 1995, jumlah nilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan mengalami perubahan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan dari kebijakan yang diberlakukan pada setiap era pemerintahan di Korea Selatan (Choi G. B., 2022). Seperti contoh, pada masa pemerintahan liberal selama tahun 2000 – 2007, jumlah bantuan yang diberikan mencapai titik tertingginya pada angka 2 ribu triliun Won. Namun, pada saat pemerintahan konservatif mulai memerintah Korea Selatan mulai tahun 2008, jumlah nilai bantuan yang diberikan semakin menurun, hingga mencapai titik terendahnya pada tahun 2016 (Ministry of Unification, 2022).

Penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara mulai kembali

digalakkan pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 melalui kebijakan *Sunshine Policy* yang kembali dijalkannya. Sebagai langkah pertama untuk melanjutkan upaya penyaluran bantuan kemanusiaan, Korea Selatan menyetujui pemberian paket bantuan senilai 10,1 miliar Won untuk Korea Utara pada bulan September 2017. Walaupun pada saat itu, Amerika Serikat dan Jepang menyerukan sanksi ekonomi dan diplomatik terhadap Korea Utara akibat uji coba nuklir yang dilakukan pada bulan yang sama (McCurry, 2017). Sedangkan pada tahun 2018, dilaporkan terdapat tiga belas organisasi swasta Korea Selatan yang menyediakan bantuan langsung sebesar 6,5 miliar Won kepada Korea Utara secara privat dalam bentuk obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk penyakit TBC, kebutuhan sehari-hari seperti susu, tepung, dan lainnya (Ministry of Unification, 2019).

Pada tahun 2019, Pemerintah Korea Selatan mengesahkan bantuan dana sebesar 4,8 miliar Won kepada UNICEF untuk program kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak pada bulan Mei 2019. Di bulan yang sama, Pemerintah Korea Selatan juga memberikan bantuan dana sebesar 6,2 miliar Won kepada *World Food Programme* (WFP) untuk penyediaan bantuan makanan bernutrisi untuk rumah sakit dan tempat penitipan anak di Korea Utara. Kedua bantuan dana dengan total sebesar 11 miliar Won tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara yang sedang mengalami krisis pangan terparah dalam satu dekade akibat bencana kekeringan dan gagal panen massal (Choe, 2019). Korea Selatan juga merencanakan untuk memberi bantuan berupa 50 ribu ton beras melalui WFP pada bulan Juni 2019, walaupun bantuan tersebut ditolak oleh Korea Utara akibat

tensi politik kedua negara yang kembali memburuk pada saat itu. (Choi G. B., 2022).

Namun, penyaluran bantuan kemanusiaan ke Korea Utara sempat terputus akibat pandemi COVID-19 mulai melanda seluruh dunia pada tahun 2020. Hal ini menyebabkan Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama menutup akses perbatasan negaranya masing-masing, dan menyebabkan pemerintah dan organisasi swasta mengalami kesulitan dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan atau mengunjungi Korea Utara. Oleh karena itu, program pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korea Utara oleh organisasi swasta sempat dihentikan untuk sementara pada bulan September 2020, dan kembali dilanjutkan pada bulan Juli 2021 (Ministry of Unification, 2022). Walaupun upaya pemberian bantuan kepada Korea Utara sempat terhambat pada tahun 2020, pemerintah Korea Selatan tetap menawarkan bantuan pandemi COVID-19 berupa vaksin, alat-alat medis, obat-obatan, dan masker kepada Korea Utara. Namun, Pemerintah Korea Utara secara tegas menolak tawaran bantuan tersebut melalui Kongres ke-8 Partai Pekerja Korea Utara. Alasan Korea Utara menolak bantuan dari Korea Selatan karena penawaran bantuan dan kerjasama kesehatan tersebut dianggap tidak terlalu penting untuk diterima, dan pihak Korea Utara merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan medisnya sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19 (Choi G. B., 2022).

Melihat dari konsep *multitrack diplomacy* yang dijelaskan oleh McDonald (2012), dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Korea Selatan sebagai aktor jalur pertama merupakan aktor yang berperan dalam merencanakan kebijakan mengenai penyaluran bantuan

kemanusiaan sekaligus menyalurkan bantuan kepada Korea Utara secara langsung. Selain aktor pemerintah, peran aktor masyarakat sebagai aktor jalur keempat terlihat melalui peran organisasi swasta dan LSM dalam bidang kemanusiaan yang ikut menyumbangkan bantuan kemanusiaan sekaligus bekerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan tersebut. Kemudian, peran media massa sebagai aktor jalur kesembilan berperan dalam memberitakan kebijakan Pemerintah Korea Selatan terkait dengan bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara, dan memberikan informasi terkait dengan upaya-upaya penyaluran bantuan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini berargumentasi bahwa terdapat tiga jenis kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara selama periode tahun 2017 – 2020 melalui pemerintah, masyarakat, dan media massa sebagai pelaku diplomasi publik. Diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara dilakukan setelah melihat bahwa proses penyelesaian konflik dan rekonsiliasi antar kedua negara masih dilakukan dengan cara tradisional, bahkan seringkali menggunakan konfrontasi keras melalui cara militer. Namun, semua upaya yang telah dilakukan masih belum memberikan dampak yang efektif terhadap proses rekonsiliasi kedua negara.

Penulis menemukan bahwa terdapat tiga jenis kegiatan diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Korea Utara selama periode tahun 2017 – 2020. Kegiatan diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Korea Selatan adalah diplomasi olahraga, diplomasi budaya, dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pertama,

upaya diplomasi olahraga yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara adalah melalui penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018, pembentukan tim demonstrasi gabungan untuk taekwondo, penyelenggaraan pertandingan basket antar Korea, dan pembentukan tim olahraga gabungan Korea untuk pertandingan internasional. Kedua, Korea Selatan juga melakukan diplomasi budaya sebagai upaya untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Korea Utara melalui penyelenggaraan konser “Spring is Coming” dan proyek ekskavasi situs bersejarah Manwoldae. Ketiga, penyaluran bantuan kemanusiaan menjadi salah satu upaya diplomasi publik yang paling sering dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan. Penyaluran bantuan kemanusiaan ini bertujuan sebagai upaya persuasif dari Korea Selatan untuk mengurangi tensi politik dengan Korea Utara sekaligus menjaga harmoni dan perdamaian dalam hubungan bilateral antar Korea.

Kegiatan diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan ternyata mempunyai dampak yang signifikan bagi peningkatan hubungan bilateral dengan Korea Utara. Dampak positif dari diplomasi publik yang dilakukan oleh Korea Selatan kepada Korea Utara diantaranya terlaksananya KTT Antar Korea 2018. Hal ini terlihat melalui upaya Korea Selatan yang menjadikan KTT Antar Korea 2018 sebagai tindak lanjut dari penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2018. Dengan terlaksananya KTT Antar Korea 2018, Korea Selatan dan Korea Utara dapat melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Selain menghasilkan kerja sama pada kedua bidang tersebut, KTT Antar Korea juga menghasilkan Deklarasi Panmunjom yang salah satu poinnya menegaskan bahwa kedua belah pihak akan berkomitmen meningkatkan upaya kerjasama dan

pertukaran antar negara. Poin dalam Deklarasi Panmunjom tersebut kemudian menjadi landasan bagi Korea Selatan untuk melanjutkan beberapa kegiatan diplomasi publik yang sempat berhenti, seperti pembentukan tim olahraga gabungan antar Korea, penyelenggaraan konser musik di Korea Utara, dan upaya diplomasi publik lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Korea Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Korea Selatan diharapkan dapat berusaha untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Korea Utara, agar pelaksanaan diplomasi publik antar negara yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan baik.
2. Pemerintah Korea Selatan dapat melanjutkan upaya-upaya diplomasi publik yang telah dilakukan selama periode tahun 2017 – 2020 setelah masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in berakhir.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods (4th Edition)*. Oxford: Oxford University Press.
- Cahyo, A. N. 2012. *Perang-Perang Paling Fenomenal Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Mas'ood, Mochtar & Yang Seung-yoon. (2004). *Politik Luar Negeri Korea Selatan: Penyesuaian Diri Terhadap Masyarakat Internasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ministry of Unification. (2019). *2019 Unification White Paper*. Seoul: Ministry of Unification.

- Ministry of Unification. (2021). 2021 *Unification White Paper*. Seoul: Ministry of Unification.
- Ministry of Unification. (2022). 2022 *Unification White Paper*. Seoul: Ministry of Unification.
- Mujiono, Dadang Ilham & Frisca Alexandra. 2019. *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Oberdofer, Don & R. Carlin. 2013. *The Two Koreas: A Contemporary History*. Basic Books.
- Oktorino, Nino. 2013. *Konflik Bersejarah: Perang yang Tidak Boleh Dimenangkan (Kisah Perang Korea, 1950-1953)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Seth, Michael. J. 2011. *A History of Korea: From Antiquity to the Present*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Stueck, William. 1999. *The Korean War: an International History*. New Jersey: Princeton University Press.
- Acuan artikel dalam buku:**
- Kunis, Sarah. 2017. "Teamwork Makes the Dream Work: Assessing the Potential of Sports as a Tool of Public Diplomacy in Inter-Korean Relations". Seoul: Hangang Network.
- Acuan artikel dalam Jurnal:**
- Anindita, Vinesha. 2017. "Implementasi Kebijakan *Sunshine Policy* Sebagai Bentuk Upaya Korea Selatan Dalam Proses Reunifikasi dengan Korea Utara Pada Masa Kepemimpinan Kim Dae Jung", dalam *Global & Policy Vol.5 No.1*, pp. 104 – 119. <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1904>
- Choi Gyu-bin. 2022. "The Provision of Humanitarian Assistance to North Korea through Multilateral Cooperation", dalam *Online Series Korean Peninsula Series of Freedom, Peace, and Prosperity No. CO 22-21*. <https://www.kinu.or.kr/pyxis-api/1/digital-files/3cbd5f96-716a-4e7c-b8b8-c59b9911fe15#:~:text=From%201995%20to%202021%2C%20South,amounded%20to%20KRW%20925.8%20billion.>
- Gurgu, Elena & Aristide Dumitru Cociuban. 2016. "The Role of Public Diplomacy in International Relations in Full Process of Globalization", dalam *Annals of Spiru Haret University Economic Series vol. 7*, pp.125 – 143. <https://doi.org/10.26458/16210>
- Johnson, John. A. & George Vitale. 2018. "Taekwondo Diplomacy: New Possibilities For Peace on the Korean Peninsula", dalam *Physical Activity Review Vol. 6* . pp. 237 – 250. <http://dx.doi.org/10.16926/par.2018.06.28>
- Lestari, Baiq Ulfa Septi, Lalu Putrawandi Karjaya, & Muhammad Sood. 2021. "Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara", dalam *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 3 Ed. 1*. pp. 81 – 109. <https://ijgd.unram.ac.id/index.php/ijgd/article/download/32/18>
- McDonald, John. W. 2012. "The Institute for Multi-Track Diplomacy" dalam *Journal of Conflictology Vol. 3 Issue 2*. pp. 66 – 70. <http://dx.doi.org/10.7238/joc.v3i2.1629>

Rachmawati, Iva. 2016. "Pendekatan Konstruktivis Dalam Kajian Diplomas Publik Indonesia", dalam *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 5 Edisi 2*. pp. 113 – 123. <https://doi.org/10.18196/hi.5290>

Acuan artikel dalam website:

Banka, Naha. 2020. "Explained: North Korea-South Korea Relations, Two Years After Pyongyang Joint Declaration", dalam <https://indianexpress.com/article/explained/explained-north-korea-south-korea-relations-two-years-after-the-pyongyang-joint-declaration-6601512/>. Diakses 10 Januari 2023.

BBC News Indonesia. 2018. "Korsel: Korea Utara terima tawaran dialog bahas Olimpiade", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42575363.amp>. Diakses 10 Januari 2023.

Choe Sang-hun. 2019. "South Korea Announces \$8 Million Aid Package for North", dalam <https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/north-korea-aid-south.html>. Diakses 8 Januari 2023.

Choe Sang-hun. 2021. "North Korea, citing the pandemic, will skip the Tokyo Olympics", dalam <https://web.archive.org/web/20210415211357/https://www.nytimes.com/2021/04/05/world/asia/covid-north-korea-olympics.html>. Diakses 7 Januari 2023.

Choi He-suk. 2018. "Two Koreas Hold First Unification Basketball Match in 15 Years" dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2018/07/04/two-koreas-hold-first-unification-basketball-match-in-15-years.html>. Diakses 8 Januari 2023.

KBS World Radio. 2020. "Semenanjung Korea, A to Z", dalam

<http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/index.htm?lang=i>. Diakses 10 Januari 2023.

Kim Chang-keum. 2018. "Rousing Standing Ovation Greets Korean Athletes During Joint Entrance at Pyeongchang Olympics", dalam https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/831722.html Diakses 10 Januari 2023.

Korean Cultural Center. 2020. "Permulaan Baru yang Damai: Deklarasi Panmunjeom", dalam <https://id.korean-culture.org/id/1016/korea/771>. Diakses 8 Januari 2023.

Orjoux, Alanne & Steve George. 2018. "Kim Jong Un Offers Rare Olive Branch to South Korea", dalam <https://edition.cnn.com/2017/12/31/asia/kim-jong-un-new-year-address-nuclear/index.html>. Diakses 10 Januari 2023.

Wertz, Daniel. 2017. "Inter-Korean Relations", dalam <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/inter-korean-relations>. Diakses 10 Januari 2023.

Yonhap News. 2017. "Moon Calls on N. Korea To Participate In Olympics, Reaffirms Goal of Peaceful Reunification", dalam <https://en.yna.co.kr/view/AEN20171031007500315>. Diakses 7 Januari 2023.

Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi:

Hanafiaty, Nurul. 2019. "Pengaruh Identitas Nasional Bangsa Korea Terhadap Kebijakan Luar Negeri Unifikasi Korea Selatan Dengan Korea Utara", Skripsi Hubungan Internasional: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Resamaili, Taufik. 2009. “Peredaan Ketegangan Dalam Perspektif Konstruktivis: Studi Kasus Konflik Korea Utara-Korea Selatan (2000–2002)”, Tesis Hubungan Internasional: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Suprianto, Bella Agustina. 2019. “Diplomasi Publik Korea Selatan – Korea Utara: Studi Kasus Diplomasi Olahraga”, Skripsi Hubungan Internasional: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.